

PABRIK GULA REDJO AGUNG BARU MADIUN TAHUN 1950-1966

Firdhanti Dinda Aulia

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: firdhanti.18087@mhs.unesa.ac.id

Nasution

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nasution@unesa.ac.id

Abstrak

Keberadaan industri gula mengalami perkembangan pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda dan mampu menjadikan gula sebagai salah satu komoditas ekspor yang sangat penting. Industri gula merupakan industry yang juga menjadi sasaran dari nasionalisasi yang dilakukan pemerintah. Nasionalisasi sendiri bertujuan untuk membangun perekonomian Indonesia yang mandiri dan juga independen, sehingga tidak ada campur tangan lagi dari pihak asing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang nasionalisasi Pabrik Gula Redjo Agung Baru Madiun tahun 1950-1966 dan juga menganalisis perkembangan Pabrik Gula Redjo Agung Baru Madiun pasca nasionalisasi tahun 1950-1966.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yang pertama yakni heuristik atau pengumpulan sumber dari karya ilmiah sebelumnya serta karya dari beberapa peneliti yang mengkaji terkait masalah yang relevan, untuk sumber primernya berupa arsip ANRI, dari arsip tersebut saya dapat menjawab masalah mengenai pengambil alihan pabrik gula Redjo Agung Baru menjadi milik pemerintah. Tahap kedua yaitu kritik yakni melakukan pengujian dengan cara mengolah sumber yang telah didapatkan salah satunya adalah sumber dari ANRI mengenai penyerahan pabrik gula Redjo Agung Baru kepada pemerintah. Tahap ketiga yaitu interpretasi yakni menafsirkan data dengan menganalisis sumber yang telah di verifikasi. Dan tahap keempat yaitu historiografi yakni penulisan hasil penelitian secara kronologis dan analitis dengan menerangkan fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh sesuai dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan Pabrik Gula Redjo Agung Baru Madiun sebelum nasionalisasi dan pasca nasionalisasi tahun 1950-1966. Setelah adanya nasionalisasi pabrik gula Redjo Agung Baru berada dibawah pengawasan Menteri Keuangan. Kebijakan nasionalisasi ini memberi dampak bagi pabrik gula, dampak yang ditimbulkan berupa adanya perubahan sistem manajemen pabrik dan kemampuan pekerja dalam menjalankan proses produksi.

Kata Kunci: Nasionalisasi, Industri Gula, Madiun.

Abstract

The existence of the sugar industry developed during the Dutch Colonial Government and was able to make sugar one of the most important export commodities. The sugar industry is an industry that is also the target of nationalization by the government. Nationalization itself aims to build an independent and independent Indonesian economy, so that there is no more interference from foreign parties. This study aims to analyze the background of the nationalization of the Redjo Agung Baru Madiun Sugar Factory in 1950-1966 and also to analyze the development of the Redjo Agung Baru Madiun Sugar Factory after the nationalization in 1950-1966.

This study uses a historical research method which consists of four stages, the first is heuristics or source collection from previous scientific works and the work of several researchers who examine relevant issues, for the primary source in the form of the ANRI archive, from the archive I can answer the problem regarding the takeover of the Redjo Agung Baru sugar factory became the property of the government. The second stage is criticism, namely testing by processing sources that have been obtained, one of which is a source from ANRI regarding the handover of the Redjo Agung Baru sugar factory to the government. The third stage is interpretation, which is interpreting the data by analyzing verified sources. And the fourth stage is historiography, namely writing research results chronologically and analytically by explaining historical facts that have been obtained according to the research theme.

The results of this study explain how the development of the Redjo Agung Baru Madiun Sugar Factory before nationalization and after nationalization in 1950-1966. After the nationalization of the sugar factory, Redjo Agung

Baru was under the supervision of the Minister of Finance. This nationalization policy had an impact on sugar factories, the impact of which was in the form of changes in the factory management system and the ability of workers to carry out the production process.

Keywords: Nationalization, Sugar Industry, Madiun



PENDAHULUAN

Industri gula merupakan sektor yang penting dalam perekonomian di Indonesia. Gula sendiri merupakan komoditas ekspor yang diminati oleh bangsa Eropa. Industri gula di Indonesia telah ada sejak masa penjajahan oleh bangsa Belanda. Perkembangan industri gula yang sangat pesat terjadi pada masa tanam paksa. Dengan hasil yang melimpah telah membuat Indonesia menjadi produsen gula yang mengalami masa kejayaan hingga tahun 1930.¹

Perkembangan Industri gula pada masa-masa selanjutnya terus mengalami pasang surut. Dengan adanya pengambil alihan wilayah Indonesia oleh tentara Jepang tahun 1942 juga membawa dampak dalam perkembangan Industri gula itu sendiri. Jepang membuat kebijakan dengan mengalih fungsikan pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia menjadi gudang-gudang militer. Bahkan kegiatan instalansi pabrik gula pun dibongkar oleh Jepang dan mesinnya diambil dan dibawa pulang ke negara Jepang.²

Namun hingga memasuki masa kemerdekaan pengaruh yang diberikan oleh Belanda di bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan oleh Bangsa Indonesia. Kekuasaan atas ekonomi Indonesia sangat sulit dilepaskan karena Belanda terus berusaha dengan gigih untuk tetap menduduki wilayah Indonesia. Bahkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pun tidak diterima begitu saja oleh Belanda. Belanda terus saja berupaya untuk kembali menduduki wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia terus berusaha untuk bisa melepaskan diri dari kekuasaan Belanda, bangsa Indonesia terus berusaha untuk melakukan Revolusi. Upaya bangsa Indonesia ini sendiri berjalan hingga tahun 1949 ketika akhirnya Belanda mengakui kedaulatan RI.

Permasalahan masih terus ada walaupun Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia, permasalahan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi. Kegiatan perekonomian Indonesia pun masih didominasi oleh pihak Belanda. Terdapat banyak perusahaan-perusahaan besar yang masih dibawah kuasa Belanda. Adapapun beberapa perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh Belanda diantaranya, perusahaan perkebunan, perkapalan, gula, kereta api, dan hiburan. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah tersebar diberbagai wilayah yang terutama berada diwilayah Jawa. Dengan adanya perusahaan-perusahaan milik Belanda ini menjadikan adanya permasalahan tersendiri bagi perekonomian Indonesia meskipun sudah merdeka. Dengan adanya permasalahan tersebut Indonesia belum bisa mandiri dibidang perekonomian.

Dengan adanya kemerdekaan Indonesia terus berusaha untuk melakukan pembenahan untuk menuju keadaan yang baru dan lebih baik. Pembenahan-pembenahan yang dilajukan salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Pembangunan dan pengembangan ekonomi memiliki perhatian besar, pengembangan ekonomi nasional sendiri baru muncul ditahun1951. Pembangunan ekonomi ini sendiri diprakarsai melalui gagasan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, menurut beliau pembangunan sendiri harus dilakukan dengan mulai mengubah strukturekonomi dari ekonomi colonial menuju ekonomi nasional.³ Pendapat beliau ini menjadi awal adanya berbagai program pengembangan ekonomi Indonesia yang mandiri dalam cabinet pemerintahan Indonesia. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sendiri pernah menjabat sebagai menteri perdagangan dan perindustrian pada masa kabinet Natsir. Dalam cabinet ini sendiri mengembangkan dan juga memperkokoh kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar untuk melaksanakan ekonomi nasional yang sehat.⁴

Nasionalisasi ekonomi sendiri baru gencar disuarakan pada tahun 1957. Pembangunan perekonomian semakin serius dilakukan oleh Indonesia pada akhir tahun 1957. Pada awalnya nasionalisasi sendiri dilakukan pada perusahaan-perusahaan Belanda berada di pusat. Nasionalisasi yang dilakukan di pusat ini terus berkembang ke berbagai perusahaan Belanda yang juga ada di berbagai daerah, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan gula yang ada di wilayah Madiun. Di Madiun sendiri memiliki beberapa pabrik gula, seperti Pagotan, Kanigoro dan Redjo Agung Baru. Ketiga pabrik ini sendiri tidak lepas dari adanya peristiwa nasionalisasi perusahaan yang terjadi pada tahun 1957 hingga awal tahun 1960an. Dalam skripsi ini berusaha untuk menelusuri proses nasionalisasi dari pabrik gula Redjo Agung Baru dan juga dampak apa yang ditimbulkan dari adanya nasionalisasi di perusahaan tersebut, baik itu dampak dari system manajemen pabrik maupun keadaan para pekerja pabrik. Dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Ririn Darini dan Miftahuddin yang berjudul Nasionalisasi Perusahaan Asing di Jawa Timur 1950-1966 membahas mengenai nasionalisasi perusahaan asing yang masih berada dibawah kekuasaan orang belanda yang kemudian di nasionalisasikan, dalam penelitian tersebut penulis lebih memfokuskan kajian dari aspek politik. Sedangkan dalam penelitian saya ini menjelaskan bagaimana latar belakang nasionalisasi pabrik gula Redjo Agung dari segi ekonomi.

¹ Soentoro, Novi Indiarito dan Abdul Muis S. Ali, "Usaha Tani Tebu dan Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa", dalam M. Husein Sawit dkk (ed), *Ekonomi Gula di Jawa*, (Bogor : Penerbit Institute Prtanian Bogor), hlm. 70.

² *Ibid.*, hlm.72.

³ Tim Penyusun *Sejarah Nasional, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), hlm.30.

⁴ Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 128.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian pabrik gula Redjo Agung Baru tahun 1950-1966 ini merupakan metode penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah sendiri terdapat empat tahapan dalam penelitiannya. Ke empat tahapan tersebut adalah Heuristik, Verifikasi, Intepretasi dan Historiografi.⁵

Tahapan yang pertama yakni heuristik, pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk sumber primer sendiri meliputi artikel, jurnal dan skripsi terdahulu tentang pabrik gula Redjo Agung Baru, dokumen arsip dan juga buku yang terkait dengan nasionalisasi dan juga pabrik gula Redjo Agung Baru. Untuk arsip yang saya gunakan sebagai sumber primer adalah ANRI yang merupakan arsip dari departemen keuangan 1950-1966 yang berisi mengenai penyerahan pabrik gula Redjo Agung terhadap PT Radjawali. Untuk sumber sekunder sendiri meliputi hasil wawancara, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan nasionalisasi dan juga pabrik gula Redjo Agung Baru. Untuk narasumber yang dipilih untuk wawancara berasal dari pensiunan karyawan dari pabrik gula Redjo Agung Baru.

Tahapan kedua penulis melakukan kritik sumber yang berguna untuk melakukan pengujian keabsahan sumber, dalam tahap ini penulis melakukan perbandingan dari hasil wawancara dengan pensiunan karyawan pabrik gula Redjo Agung Baru dengan sumber-sumber primer yang didapatkan.

Tahapan ketiga penulis melakukan intepretasi dengan cara menghubungkan dan juga menafsirkan berbagai sumber tentang nasionalisasi dan juga pabrik gula Redjo Agung Baru menjadi sebuah fakta. Sumber yang diperoleh melalui dokumen, arsip, buku, skripsi terdahulu dan hasil wawancara yang sesuai dengan focus penelitian. Untuk selanjutnya penulis menyusun dan menyatukan fakta-fakta menjadi sebuah tulisan yang logis, sistematis, dan kronologis.

Tahapan terakhir yaitu Historiografis, pada tahap ini penulis melakukan penyusunan penulisan. Penafsiran yang telah dilakukan penulis yang didapatkan dari sumber-sumber yang dikumpulkan dan sudah valid disusun secara deskriptif dan kronologis menjadi sebuah karya ilmiah sejarah, penulis akan menyusun cerita sejarah mengenai "Pabrik Gula Redjo Agung Baru Madiun tahun 1950-1966" hasil dari penyusunan fakta-fakta dari suatu peristiwa dalam sebuah karya ilmiah berupa jurnal artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang Nasionalisasi Pabrik Gula Redjo Agung Madiun tahun 1950-1966

Nasionalisasi di Indonesia sendiri telah terjadi sejak diproklamasikannya Republik Indonesia 1945 hal ini ditandai dengan adanya proses pemindahan kekuasaan dan juga kewenangan dari pemerintah Kolonial ke pemerintah RI di segala bidang. Setelah adanya proklamasi kemerdekaan RI terjadi proses dekolonisasi sebagai puncaknya adalah dengan diambil alihnya berbagai perusahaan milik Belanda di Indonesia. Nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia ini dilakukan karena setelah merdeka perekonomian Indonesia masih juga dikuasai oleh perusahaan-perusahaan swasta milik Belanda. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian dan kesepakatan di KMB dimana pemerintah Indonesia harus tetap mengizinkan pihak-pihak swasta Belanda untuk tetap bisa menjalankan kegiatan perekonomiannya di Indonesia, hal ini sangat jelas merugikan Indonesia. Pada awal tahun 1950 sendiri perekonomian Indonesia masih dalam kondisi yang sangat buruk. Buruknya perekonomian Indonesia ini disebabkan oleh kosongnya kas negara yang diakibatkan oleh adanya perang untuk merebut kemerdekaan dan Indonesia sendiri tidak memiliki pendapatan sama sekali. Selama terjadinya perang Belanda telah melakukan blockade kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Tindakan Belanda tersebut membuat kegiatan ekspor Indonesia terhenti terasuk dalam bidang Industri Gula selama tahun 1945 hingga awal tahun 1950an.

Dengan buruknya keadaan ekonomi Indonesia tersebut mengancam kelangsungan hidup bangsa Indonesia, sehingga sekitar awal tahun 1950 pembangunan ekonomi mulai dipikirkan oleh para tokoh Indonesia. Nasionalisasi sendiri diartikan sebagai sebuah aspirasi suatu bangsa untuk memiliki asset-aset yang masih dikuasai oleh bangsa lain, dan juga fungsi ekonomi yang masih dikendalikan oleh bangsa lain.⁶ Gagasan pembangunan ekonomi sendiri sebenarnya sudah ada sejak awal kemerdekaan. Dalam konferensi ekonomi yang diadakan pada tanggal 3 february 1946, Mohammad Hatta memiliki pendapat bahwa adanya kerjasama yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda hanya akan menimbulkan beban erhadap bangsa Indonesia sendiri dan hal ini jelas menggambarkan tidak berdaulatnya perekonomian Indonesia.⁷ Pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan upaya untuk melakukan pembangunan dalam bidang perekonomian. Pada sekitar tahun 1950an pemerintah mengeluarkan

⁵ Kntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm.89-105.

⁶ A. Dahana, dkk., *Indonesia dalam Arus Sejarah Pasca Revolusi*, (Jakarta: Ihtiar Baru van oude, 2012), hlm.285.

⁷ *Ibid.*

sebuah program Benteng, program ini sendiri berujuan untuk menghimpun golongan pengusaha Indonesia. Dengan dihimpunya para pengusaha ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional.⁸

Sejak tahun 1957 sampai tahun 1960 tercatat sudah sebanyak 70-an perusahaan Belanda yang ada di Indonesia yang telah berhasil di nasionalisasikan. Para penguasa Tionghoa yang juga memiliki dominasi terhadap industri-industri besar yang ada di Indonesia. Pada nasionalisasi yang terjadi sekitar tahun 1957 para pengusaha Tionghoa tidak merasakan dampak secara langsung dari peristiwa nasionalisasi tersebut. Pada tahun tersebut pengambil alihan perusahaan asing hanya difokuskan pada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh pihak Belanda. Namun dalam prosesnya pada tahun-tahun berikutnya, pengusaha Tionghoa juga merasakan dampaknya nasionalisasi. Hal ini disebabkan oleh desakan masyarakat terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Desakan ini berawal dari rasa tidak suka kaum pribumi terhadap Tionghoa. Keberhasilan dari orang-orang Tionghoa yang menguasai hampir 50% sektor Industri di Indonesia menimbulkan kecemburuan bagi kaum pribumi.⁹

Jauh sebelum merdeka kaum pribumi sudah menyimpan rasa tidak senang terhadap kaum Tionghoa, hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial seolah sengaja membentuk jarak antara kaum pribumi dengan keturunan Tionghoa melalui strata yang dibuat dalam masyarakat. Belanda memiliki strata paling atas, strata kedua pemerintah colonial menempatkan orang Tionghoa sedangkan masyarakat pribumi berada pada strata paling bawah.¹⁰ karena desakan pribumi untuk merebut perusahaan milik Tionghoa agar dinasionalisasikan pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan PP No. 10 tahun 1959. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut berisi mengenai larangan bagi orang Tionghoa untuk membuka usaha di Indonesia.¹¹

Berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pendirian usaha oleh orang Tionghoa tersebut, lebih lanjutnya pemerintah juga mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tindakan nasionalisasi terhadap PG Redjo Agung Baru. PG Redjo Agung Baru sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki oleh orang Tionghoa yang wilayahnya berada di Madiun. Dengan dinasionalisasikannya PG Redjo Agung Baru tersebut pemerintah memberikan kekuasaan kepada PT

Radjawali Indonesia untuk mengelola PG Redjo Agung Baru.¹² Dari surat-surat yang berada di Arsip Nasional Republik Indonesia menunjukkan adanya pengambilalihan PG Redjo Agung baru dari pemiliknya yaitu *Oei Tiong Ham Concern* ke tangan PT Radjawali Indonesia. PT Radjawali Indonesia sendiri merupakan sebuah perusahaan yang telah dibentuk oleh pemerintah RI dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi nasional. PT Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional (PPEN) Radjawali Indonesia ini didirikan oleh pemerintah dengan akte otaris Hjanja Adaaiah Harahap di Jakarta tanggal 12 Oktober 1964 nomor 5. Berdasarkan akta tersebut perusahaan ini resmi milik negara.¹³

Selain adanya tuntutan dan juga desakan dari kaum pribumi, nasionalisasi terhadap PG Redjo Agung Baru ini terjadi dikarenakan PG tersebut telah melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut adalah mengenai kepemilikan saham atau modal. Akan tetapi, tidak terdapat informasi yang jelas yang menjelaskan pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh PG Redjo Agung Baru. Kepemilikan PG Redjo Agung Baru ini resmi dilimpahkan kepada pemerintah namun dalam pengelolaannya dilakukan menggunakan system perusahaan swasta.¹⁴

Keberadaan PG Redjo Agung di Madiun sendiri berada dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hal ini berdasarkan pada Perda pada Jawa Timur No. Kap-36/11/1965 tertanggal 12 November 1965.¹⁵ Jika berdasarkan pembagian tugas BANAS, terdapat perusahaan-perusahaan yang dikategorikan dalam pengawasan pemerintah pusat dan ada perusahaan yang masuk kedalam pengawasan pemerintah daerah. Untuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh *Oei Tiong Ham Concern* yang berada di wilayah Jawa Timur seluruh perusahaannya berada dibawah pengawasan pemerintah provinsi.

Pengajuan pembentukan perusahaan yang khusus menangani perusahaan bekas milik *Oei Tiong Ham Concern* telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1964. Dari pihak Departemen Keuangan menuliskan surat kepada presiden Republik Indonesia terkait dengan hal ini. Dalam surat tertanggal 18 Agustus 1964 No.0639/M.K.3/64 tersebut Menteri Keuangan mengajukan persetujuan presiden untuk membentuk PT Rajawali guna melanjutkan dan mengintegrasikan perusahaan-perusahaan milik *oei Tiong Ham Concern*. Tak lama kemudian presiden Soekarno membrikan balasan surat yang berisikan mengenai persetujuan

⁸ Bondan Kanumoyoso, *iop.cit.*, hlm.7.

⁹ Bisuk Siahaan, *op.cit.*, 505.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.504.

¹¹ BPAD, Peraturan Pemerintah tahun 1965. No.10

¹² ANRI, Inventaris Arsip Departemen Keuangan Tahun 1950-1959, No. Inventaris 471.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hasil dari wawancara dengan Saimin, pensiunan karyawan di PG Redjo Agung Baru.

¹⁵ *Ibid.*

pendirian PT tersebut pada tanggal 24 Agustus 1964 No. 1636/TU/64.¹⁶

B. Perkembangan Pabrik Gula Redjo Agung Baru Pasaca Nasionalisasi

Nasionalisasi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap industri gula yang ada di tanah air. Sejak diambil alihnya pabrik-pabrik gula milik swasta atau asing, produksi gula mengalami penurunan secara nasional. Bahkan penurunan produksi tersebut sudah terjadi sejak pertengahan tahun 1950an. Pada sekitar tahun 1960 produksi gula nasional hanya mencapai 651,8 ribu ton gula/Ha. Hasil produksi tersebut mengalami penurunan yang sangat tajam jika dibandingkan dengan hasil produksi nasional pada tahun 1930an yang telah mencapai 14,79 juta ton gula/Ha.¹⁷ Berikut merupakan tabel hasil produksi gula:

Tabel 1
Kinerja Produksi dan Produktivitas Gula, 1950-1970

Tahun	Area (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1950	27.783	2.452.984	88,29
1955	72.426	7.281.504	100,54
1960	72.726	5.985.399	82,30
1965	87.408	7.368.946	84,31
1970	81.667	7.895.276	96,66

Sumber: Subiyono, *Sumbangan Pemikiran Menggapai Kejayaan Industri Gula Nasional*, (Surabaya: PTPN X, 2014), hlm.18.

Dengan menurunnya produksi gula ini mempengaruhi kemampuan ekspor yang dimiliki oleh Indonesia. Gula dahulu merupakan komoditas ekspor yang utama justru mulai tenggelam sebagai akibat dari adanya nasionalisasi. Dengan menurunnya produktivitas tersebut Indonesia berubah peran, yang dulunya negara pengekspor berubah menjadi negara pengimpor gula.¹⁸ Penurunan produksi gula ini juga diakibatkan oleh kurangnya tenaga ahli karena diambil alihnya perusahaan oleh pemerintah Indonesia. Para *manajer* dan juga teknisi yang dulunya merupakan orang-orang asing telah kembali ke negaranya. Kekurangan tenaga ahli ini menimbulkan

permasalahan tersendiri dalam pabrikgula, karena para pengganti masih belum memiliki kemampuan yang cukup.

Pabrik-pabrik gula yang telah diambil alih atau dinasionalisasikan oleh pemerintah dipimpin langsung oleh pribumi. Pimpinan dari PG Redjo Agung Baru sendiri dipimpin oleh orang pribumi yaitu oleh Maryono sejak dinasionalisasikan tepatnya pada tahun 1964.¹⁹ Namun pada periode selanjutnya pimpinan PG Redjo Agung kembali dipegang oleh keturunan Tionghoa. Kepemimpinan Tionghoa itu terus berjalan hingga tahun 1985. Untuk staf dari PG Redjo Agung ini sendiri juga banyak dari keturunan Tionghoa. Namun setelah tahun 1970 keturunan Tionghoa yang bekerja di PG Redjo Agung semakin berkurang jumlahnya dan perlahan pabrik dikendalikan sepenuhnya oleh orang pribumi.

Kepemimpinan pabrik yang berda di bawah tangan pribumi perlahan mulai membaik dan berjalan dengan baik. Dalam proses produksinya pabrik tidak mengganti mesin-mesin yang ditinggalkan oleh pihak swasta atau asing, mesin-mesin giling yang ditinggalkan masih terus digunakan. Namun pada tahun 1965 ada penambahan alat berupa ketel²⁰ tegangan menengah dan turbin pembangkit listrik.²¹

Setelah adanya nasionalisasi PG Redjo Agung Baru sistem pembagian karyawan dibagi menjadi tiga. Karyawan satu merupakan karyawan staff atau disebut juga dengan pimpinan. Karyawanan pimpinan atau staff sendiri terdiri dari administrator, kepala tanaman, kepala pabrik, kepala pengolahan dan PUK. Masing-masing dari kepala bagian tersebut membawahi karyawan ditingkat dua. Karyawan tingkat dua sendiri terdiri dari vakman, bagian penggilingan dan juga mandor tanaman. Karyawan tingkat dua ini pada umumnya berasal dari karyawan harian yang kemudian diangkat menjadi karyawan kontrak di pabrik gula. Untuk tingkatan terakhir karyawan ini disebut dengan karyawan musiman. Karyawan musiman ini bekerja hanya pada musim giling saja. Musim giling sendiri pada umumnya dilakukan pada bulan Mei hingga September.

Berkaitan dengan pengolahan lahan tebu, untuk sistem sewa tanah sendiri masih menggunakan sistem peninggalan Belanda. Sistem ini sendiri disebut dengan sistem *glebakan*. Sistem ini merupakan sistem sewa lahanyang dilakukan oleh PG dengan cara menyewa lahan selama dua tahun. Setelah berjalan dua tahun lahan tersebut dikembalikan kepada pemilik

¹⁶ BPAD, Peraturan Pemerintah 1964. No. 3

¹⁷ Soentoro, dkk, "Usaha Tani Tebu dan Tebu Rakyat Intensifikasi di Jawa", dalam M. Husein Sawit, dkk (ed), *Ekonomi Gula di Indonesia*, (Bogor: IPB), hlm.517.

¹⁸ *IBID.*, hlm.75.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Saimin, pensiunan karyawan di PG Redjo Agung baru.

²⁰ Ketel merupakan alat pemasak gula. Benda ini berfungsi untuk menghasilkan uap yang akan memanaskan benjanapemasak nira tebu yang kemudian akan di proses menjadi gula. (Berdasarkan hasil Wawancara dengan Djumadi dan Wito pensiunan karyawan).

²¹ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Djumadi dan Wito pensiunan karyawan

lahan. Biasanya pengembalian lahan ini dipergunakan untuk menanam padi oleh pemilik lahan. Sistem ini menguntungkan PG karena dengan pergantian tanaman ini dapat menghasilkan tebu yang berkualitas. Sistem *glebakan* dipercaya merupakan sebuah sistem yang baik untuk mendapatkan rendemen²² terbaik. Rendeman sendiri memiliki pengaruh besar terhadap hasil produksi gula. Semakin tingginya rendeman semakin besar pula produksi gula yang akan dihasilkan.

Pada sekitar tahun 1960an, lahan perawahan yang ada di Madiun yang digunkan untuk lahan sewa tebu telah menyebar hamper diseluruh wilayah. Bahkan PG mulai menyewa lahan-lahan persawahan yang berada diluar wilayah Madiun seperti Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. Namun kemampuan pabrik untuk menyewa lahan tersebut mulai berkurang karena adanya hiperinflasi pada masa itu. Kondisi perekonomian yang tidak stabil mengakibatkan nilai sea tanah yang dulunya dianggap sudah sesuai bagi kalangan pemilik lahan dianggap menurun. Para pemilik lahan mulai enggan untuk menyewakan lahan untuk PG.²³ Keadaan ini terus berjalan pada tahun-tahun berikutnya yang mengakibatkan jumlah lahan yang dimiliki PG berkurang.

Pada sekitar tahun 1963, telah terjadi perubahan terhadap sistem sewa lahan tebu. pemerintah mengeluarkan kebijakan bagi hasil bagi rakyat yang bersedia menyewakan lahan untuk pabrik gula. Bagi hasil tersebut dengan sistem memberikan 25% hasil gula yang didapatkan dari tebu yang ditanam dilahan mereka.²⁴ Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah dikarenakan pada tahun-tahun itu sedang terjadi hiperinflasi. Kondisi tersebut ditakutkan akan mempengaruhi kemauan masyarakat untuk menyewakan lahannya. Namun kebijakan tersebut tidak begitu menarik minat masyarakat di Madiun sehingga sewa lahan tetap mengalami kesulitan.

Kebijakan untuk menasionalisasikan perusahaan asing termasuk PG Redjo Agung yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung juga membawa dampak terhadap karyawan. Kemampuan karyawan pabrik pasca nasionalisasi memang tidak bisa disamakan dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan pabrik saat masih dibawah kekuasaan pihak asing atau swasta. Namun hal tersebut tidaklah

menyebabkan adanya penurunan tingkat kesejahteraan karyawan pabrik gula di Madiun. Sistem produksi di PG Redjo Agung menurut karyawan yang dulu bekerja pada sekitar tahun 1960-1970an masih berjalan tanpa ada perbedaan yang signifikan antar sebelum adanya nasionalisasi dan sesudah nasionalisasi. Pada saat masa kolonial hingga awal 1980an industry gula merupakan industry yang maju dan mampu memberikan kesejahteraan bagi karyawannya.²⁵ Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah adanya perhatian dari pihak pabrik terkait dengan kesehatan, keselamatan kerja dan juga pembagian bonus. Bonus karyawan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu *tantiem*²⁶ dan jasa produksi. *Tantiem* sendiri diberikan kepada karyawan tingkat satu atau sering disebut dengan karyawan staff. Pembagian bonus ini dilakukan saat pabrik mendapatkan keuntungan dan dibagikan pada akhir masa giling.

Kestabilan pasca nasionalisasi juga dapat dilihat dari kemampuan pabrik untuk menggaji para karyawan. Gaji yang diterima oleh karyawan tingkat dua PG Redjo Agung sebesar Rp. 1700 yang diberikan setiap minggu. Jumlah tersebut masih sama ketika PG Redjo Agung masih dibawah kepemilikan *Oei Tiong Ham Concern*.²⁷ Sedangkan para karyawan tingkat satu mendapatkan fasilitas berupa rumah tinggal. Bukan hanya mengenai gaji, namun pasca nasionalisasi para pekerja mengalami perubahan status. Para pekerja di pabrik gula pada masa belanda memiliki dua tingkatan, yaitu pegawai dan buruh. Namun setelah nasionalisasi para pekerja dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu karyawan satu dan karyawan dua.

PENUTUP Kesimpulan

Industri gula merupakan sektor yang penting untuk menopang perekonomian Indonesia sejak masa Hindia Belanda sampai awal kemerdekaan. Industri gula ini menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar internasional. Belanda yang pintar membaca peluang segera menjalankan Industri Gula di Indonesia. Masa keemasan industri gula sendiri mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1870-1930, diawali dengan dikeluarkannya UU Gula dan UU Agraria serta diakhiri dengan adanya peristiwa depresi ekonomi. Tak hanya Belanda Tionghoa juga memegang perindustrian di Indonesia, salah satunya adalah

²² Rendemen merupakan kadar nira yang ada di dalam tebu, pada tahun 1960an rendeman tebu cukup tinggi di wilayah Madiun yang mencapai 12. Namun setelah tahun 1975 rendeman mulai menurun bahkan jarang sekaali emncapai angka 8. (Wawancara dengan Djumadi, pensiunan karyawan PG).

²³ Subiyono, *Sumbangan Pemikiran Menggapai Kejayaan Industri Gula Nasional*, (Surabaya: PTPN X,2014), HLM.20.

²⁴ Sri Wahyuni, dkk, *Industri dan Perdagangan Gula di Indonesia: Pembelajaran dari Kebijakan Zaman Penjajahan-Sekarang*,

(Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian), hlm.139.

²⁵ Pendapat ini disampaikan oleh pensiunan karyawan

²⁶ *Tantiem* merupakan istilah untuk menyebut bonus yang diberikan kepada karayawan I (staff). (Diolah berdasarkan hasil wawancara dengan dua belas narasumber yang menyebutkan pernyataan yang sama dengan rincian data terlampir).

²⁷ Disampaikan oleh Saiman, pensiunan PG Redjo Agung Baru

Industri Gula. Pabrik Gula Redjo Agung Baru sendiri merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh orang Tionghoa yang bernama *Oei Tiong Ham Concern*.

Setelah merdeka pemerintah berusaha menstabilkan perekonomian dan menciptakan perekonomian yang independen tanpa campur tangan negara asing. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah RI melakukan upaya dengan merebut perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh pihak asing maka dari itu pemerintah melakukan nasionalisasi. Upaya untuk pengambil alihan perusahaan asing ini juga tidak luput dari Industri gula yang pada dasarnya banyak yang masih dikuasai oleh orang asing. Pada industri gula nasionalisasi dilakukansejak awal tahun 1960. Salah satunya adalah pabrik gula Redjo Agung yang berada di Madiun

Setelah dinasionalisasikan pada tahun 1964 pabrik gula Redjo Agung berada dibawah pengawasan PT Radjawali Nusantara. Pada dasarnya nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini menimbulkan berbagai dampak diberbagai bidang.

Dari penelitian ini dapat ditemukan sebuah fakta bahwa dinasionalisasikannya pabrik gula Redjo Agung Baru ini yang merupakan perusahaan gula milik orang Tionghoa yaitu Oei Tiong Ham Concern adalah adanya desakan dari masyarakat karena sentiment masyarakat terhadap orang Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

ANRI, Inventaris Arsip Departemen Keuangan Tahun 1950-1959, No. Inventaris 471.

Arsip BPAD Jawa Timur, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1965

Arsip BPAD Jawa Timur, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Gula Negara.

Buku dan Artikel :

Sartono, Novi Indarto dan Abdul Muis, "Usaha Tani Tebu dan Tebu Rakyat Intnsifikasi di Jaa", dalam M. Husein Sawit dkk (ed) dlm *Ekonomi Gula di Indonesia*, Bogor : IPB

Tim Nasionalisasi Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta : Balai Pustaka, 2008

Bibit Suprpto, *Perkembangan Kabinet dan Pemerintah di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1958.

Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Bentang, 1995.

Dahana, A. dkk, *Indonesia dalam Arus Sejarah Pasca Revolusi*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.

Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda Indonesia*, Jakarta : Sinar Harapan, 2001.

Subiyono, *Sumbangan Pemikiran Menggapai Kejayaan Industri Gula Nasional*, Surabaya : PTPN X, 2014.

Skripsi

Aris Dwi Rahdiyanto, "Perkembangan Usaha Gula Oei Tiong Ham Concern di Jawa 1900-1942", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.

Marlina Ika Purwanti, "Nasionalisasi Perkebunan the di Wonosobo 1950-1960", *Skripsi*, Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2005.

Wawancara

Saiman selaku pensiunan karyawan PG Redjo Agung Baru

Djumadi selaku pensiunan karyawan PG Redjo Agung Baru

Wito selaku pensiunan karyawan PG Redjo Agung Baru